

PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Cepi Ginanjar¹⁾, Lukman Munawar Fauzi²⁾, Toto Kushartono³⁾
1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian berjudul “Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanggungan Stunting di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat”. fenomena masalah dalam penelitian ini yaitu Belum optimalnya peran dinas kesehatan dalam penanggulangan kasus stunting di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, rumusan masalah bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana peran dinas dalam penanggulangan stunting tersebut. Peneliti menggunakan teori dari Peter Jhones terdiri dari beberapa dimensi diantaranya: 1) peran regulatif, peran peningkatan kemampuan, peran langsung. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui Pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Unit analisis meliputi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukan peran dinas kesehatan dalam penanggulangan stunting dilihat dalam dimensi regulasi belum sepenuhnya optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan terkait kebijakan tersebut. Dalam dimensi peningkatan kemampuan belum berjalan optimal dikarenakan kurangnya anggaran dan relawan dari berbagai nakes yang belum mendapatkan secara menyeluruh. Dalam dimensi peran langsung belum berjalan secara optimal masyarakat belum memahami penyuluhan seperti program hamil dan melakukan gerakan makanan yang bergizi untuk ibu hamil.

Kata Kunci: Peran, Stunting, Program.

Abstract

The phenomenon of the problem in this study is that the role of the health department in overcoming stunting cases in Cisarua District, West Bandung Regency is not yet optimal, therefore the formulation of the problem is how the role of the Health Office in overcoming stunting in Cisarua District, West Bandung Regency. The purpose of this study is to analyze and describe how the role of the agency in overcoming stunting. Researchers use the theory of Peter Jhones (Mahsun, 2013) consisting of several dimensions including: 1) regulatory role, enabling role, direct role. This research is descriptive with a qualitative approach, data collection techniques through: observation, interviews and documentation. Data analysis techniques through data

collection, data reduction and conclusion drawing. The unit of analysis includes the Head of Disease Prevention and Control, Head of Public Health, Head of Human Resources and Society. The results showed that the role of the health department in overcoming stunting can be seen in the regulatory dimension is not fully optimal due to the lack of socialization provided by the Health Office regarding the policy. In the dimension of capacity building, it has not been running optimally due to the lack of budget and volunteers from various health workers who have not received it thoroughly. In the dimension of direct roles, it has not run optimally because the community has not understood counseling such as pregnant programs and conducting nutritious food movements for pregnant women

Keywords: Role, Stunting, Program

PENDAHULUAN

Dinas kesehatan adalah salah satu lembaga pelaksanaan pemerintah dalam bidang kesehatan dan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dinas kesehatan memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian urusan daerah dalam bidang kesehatan untuk menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan dan melakukan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya (Normaisa et al., 2021). Permasalahan kesehatan sering kerap terjadi pada Gizi yang dimana, siklus kehidupan yang sangat kompleks dan penting untuk segera ditangani hal ini dapat terjadi mulai dari bayi masih dalam kandungan, balita, remaja, bahkan sampai dengan lanjut usia terutama pada anak usia dini sangat berdampak besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Sesuai dengan peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 32 Tahun 2021 diubah menjadi peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kesehatan bahwasanya Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan. Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Bandung Barat menanggulangi kasus stunting belum berjalan secara optimal. Kecamatan Cisarua yang dimana, terdapat indikasi angka stunting paling tinggi di kecamatan Cisarua, maka dari itu sesuai dengan data yang telah di dapat oleh peneliti bahwa memang terdapat angka yang tinggi pada kasus stunting di Kecamatan Cisarua. Dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tabel Data Jumlah *Stunted* pada balita pada tahun 2020 - 2023

Tahun	Jumlah Balita yang di ukur	Jumlah <i>stunted</i> (balita pendek & sangat pendek)	Presentase
2020	4910	895	18.323%
2021	4791	551	11.50%
2022	3804	495	13.01%
2023	4398	288	6.55%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat

Angka stunting pada tahun 2020 sampai tahun 2024 di kecamatan cisarua. Pada tabel tersebut angka tertinggi stunting pada balita yaitu tahun 2020 yaitu 18.323% dari 4910 jumlah balita yang di ukur dan paling terendah pada tahun 2023 yaitu 6.55% dari jumlah 4398 dari jumlah balita yang di ukur. Sementara tahun 2021 angka stunting pada balita menurun sekitar 344 anak yaitu sebesar 11.50% sedangkan pada tahun 2022 angka stunting pada balita sebanyak 13.01% dari 3804 balita. Dari data yang telah peneliti dapatkan, di lihat bahwa angka stunting di kecamatan cisarua sangat tinggi dan terntunya memiliki faktor atau alasan mengapa pada kecamatan cisarua memiliki angka stunting yang sangat tinggi. Dari fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Cisarua hanya memiliki 12 fasilitas kesehatan. Secara garis besar penyebab stunting dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) tingkatan yakni penyebab langsung, penyebab tidak langsung dan penyebab dasar (akar masalah). Penyebab tidak langsung yaitu ketersediaan dan pola konsumsi pangan rumah tangga, pola asuh serta kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan.

Berkaitan dengan fenomena yang terjadi mengenai minimnya penanggulangan stunting di Kecamatan Cisarua yang telah diuraikan di atas, berhubungan dengan peran pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan stunting teori peran dari Peter Jones (dalam Mahsun, 2013) menguraikan bahwa peran pemerintah dibagi menjadi 3 indikator yaitu:

peran regulatif (*regulatory role*), peran peningkatan kemampuan (*enabling role*) dan peran langsung (*direct role*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian melalui jenis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif Teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui Pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Unit analisis meliputi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Masyarakat.

PEMBAHASAN

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*stratus*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, maka dari itu peran adalah seseorang yang mempunyai kedudukan dan menjalankan hak kewajibannya. Hal ini menjadikan fokus penelitian yaitu terhadap peran dinas kesehatan yang bersangkutan dengan masyarakat stunting pada kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Dalam pembahasan ini peneliti akan menjelaskan 3 indikator yang menjadi dasar pembuatan pedoman wawancara berisikan pertanyaan terkait sebagaimana yang tercantum pada lampiran. Peneliti juga sudah menentukan informan-informan yang bersangkutan dengan dinas kesehatan tentunya relevan dengan topik, permasalahan, dan indikator serta pertanyaan peneliti sesuai dengan data setting penelitian ini. Dengan demikian peneliti telah melakukan penelitian dan memparkan hasilnya sebagai berikut :

1. Peran Regulatif (*Regulatory Role*) :

Dinas Kesehatan bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan, termasuk menangani stunting pada ibu dan anak. Banyak faktor yang menyebabkan stunting, salah satunya adalah kondisi ekonomi masyarakat. Dinas Kesehatan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, mengawasi berbagai

program untuk mencegah stunting. Namun, pelaksanaan program terhambat oleh kurangnya dana. Mereka berusaha seoptimal mungkin agar stunting dapat ditangani dengan cepat dan program berjalan tanpa kendala. Pengawasan dan koordinasi dilakukan dengan baik oleh Dinas Kesehatan bersama bidang lainnya. Pelayanan kesehatan mendukung program yang ada, serta memproses data kasus stunting untuk mempercepat pengobatan.

Namun, masyarakat pedesaan yang terpencil sulit dijangkau. Program penanggulangan stunting diawali sejak ibu hamil dan merupakan program nasional. Berbagai sektor seperti KB, pendidikan, dan masyarakat juga terlibat dalam pencegahan. Sangat disayangkan jika masyarakat masih kurang peduli terhadap stunting. Program ini dilaksanakan oleh pemerintah dan memudahkan pasien mengakses pengobatan yang cepat. Peningkatan pemahaman masyarakat diperlukan agar program dapat berjalan dengan baik. Kerja sama antara tenaga kesehatan dan masyarakat sangat penting agar program dapat dilaksanakan secara maksimal, meskipun terkendala oleh dana. Program hanya berjalan jika ada dana yang tersedia.

2. Peran Peningkatan Kemampuan (*Enabling Role*) :

Dalam peningkatan kapasitas sumber daya, dinas melaksanakan program penyuluhan dan sosialisasi untuk masyarakat dan tenaga kesehatan (nakes) di bidang masing-masing, seperti SDK untuk nakes dan Kesmas untuk masyarakat. Setiap bidang memiliki tugas yang berbeda, dan kerja sama semua pihak diperlukan agar penyuluhan berjalan efektif. SDK dan nakes berperan sebagai penghubung untuk meningkatkan sumber daya masyarakat, terutama dalam menanggulangi stunting. Walaupun program pelatihan untuk nakes sudah dilaksanakan dengan baik, kekurangan relawan nakes dan anggaran yang belum mencukupi menghambat pelaksanaan program ini.

Bidang Sumber Daya Kesehatan berfungsi sebagai pengendalian dan pendukung, tanpa terjun langsung ke masyarakat, tetapi melatih

nakes agar dapat meningkatkan keterampilan kader yang akan menjelaskan program kepada masyarakat. Program Pelita Bening berfokus pada pembagian telur untuk masyarakat yang terkena stunting. Dinas sumber daya kesehatan hanya sebagai pendukung dalam pembagian telur ini. Kerja sama antara berbagai bidang kesehatan, masyarakat, dan pemerintah sangat penting untuk mencapai tujuan kesehatan, terutama dalam penanggulangan stunting.

3. Peran Langsung (*Direct Role*) :

Program pencegahan stunting mengalami hambatan terkait anggaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program ini. Dinas Kesehatan berupaya menekan angka stunting, terutama di Kecamatan Cisarua, dengan mengadakan gerakan konsumsi telur setiap hari dan menyediakan makanan bergizi. Mereka juga menawarkan layanan USG gratis untuk ibu hamil. Namun, banyak masyarakat yang kurang peduli dan tidak memahami program-program ini dengan baik. Masyarakat sering kali tidak mengerti informasi yang disampaikan melalui podcast atau dalam pembagian telur gratis, sehingga ada kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya pencegahan stunting. Kerja sama antara masyarakat dan Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk menangani kasus stunting. Dinas juga mengumpulkan data jenis penyakit melalui koordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat untuk merancang program penanganan penyakit, seperti diare, serta melakukan pemantauan imunisasi.

Puskesmas dan kader berperan sebagai pusat informasi dan promosi kesehatan, termasuk imunisasi yang dilakukan secara terintegrasi. Promosi dilakukan oleh puskesmas dan kader yang bekerja sama dengan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Program pencegahan diare juga meliputi analisis dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan. P2P bertugas mendistribusikan obat-obatan, memastikan anak-anak mendapatkan pengobatan yang tepat untuk mencegah dehidrasi. Sementara program pemberian telur

sudah menunjukkan pengurangan stunting di Kabupaten Bandung Barat dalam setahun terakhir, masih ada tantangan, seperti kurangnya jumlah kader kesehatan yang terlatih dan koordinasi yang belum optimal. Dinas pencegahan dan pengendalian penyakit mengawasi kondisi ibu dan anak, serta memastikan vaksinasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Walaupun program berjalan dengan baik, masih ada beberapa masyarakat yang tidak peduli, sehingga kesadaran orang tua tentang pola pengasuhan dan pemberian makan yang baik perlu ditingkatkan.

KESIMPULAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yang mengikuti aturan hukum yang berdasarkan pada Peraturan Bandung Barat nomor Sesuai dengan peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 32 Tahun 2021 diubah menjadi peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kesehatan bahwasanya Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dapat diketahui Dinas Kesehatan sudah melakukan tugasnya dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada. Berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan menyatakan bahwa Dinas Kesehatan sudah melakukan tugas dengan baik terkait dengan penanggulangan stunting di Kecamatan Cisarua baik dalam menjalankan program serta melakukan pengawasan pada masyarakat berdasarkan peraturan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang berlaku. Namun, dengan berjalannya program stunting yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat ada beberapa yang belum berjalan dengan optimal seperti halnya sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki jarak yang tidak dijangkau dan terpencil yang susah di akses oleh para aparatur pemerintah di bidang kesehatan. Selain itu kendala lain yang membuat program stunting tidak berjalan optimal yaitu sebagian masyarakat di Kecamatan Cisarua sangat acuh dan tidak terlalu peduli dengan adanya sosialisasi, serta kurangnya anggaran dalam menjalankan suatu program stunting. Dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan tetap melakukannya dengan sepenuh hati dan menjalankan implementasi program Pemerintah Daerah dalam melawan stunting dengan cara adanya kolaborasi dengan nakes agar dapat mempermudah dalam penanggulangan dan memberikan pengobatan kepada masyarakat yang mendapati serangan stunting.

peningkatan kemampuan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat sudah dilaksanakan di berbagai wilayah terkait dengan stunting sudah berjalan dengan optimal, dengan adanya pelatihan untuk nakes sudah berjalan dengan baik serta dengan meningkatkan keterampilan nakes dengan adanya pelatihan yang dibantu oleh Kepala Desa setempat. Namun kendalanya terkait dengan anggaran dan kurangnya relawan dari berbagai nakes yang belum mendapatkan secara menyeluruh.

Walaupun program stunting ini merupakan program nasional, seharusnya lebih optimal dalam mengadakan sarana dan prasana dalam menjalankan program stunting kepada tiap wilayah di Kecamatan Cisarua seperti USG untuk ibu hamil, peralatan yang menunjang dalam melaksanakan pengobatan yang memadai.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berperan sebagai untuk mengatur berbagai kegiatan dalam mengendalikan dan mengawasi dari sejumlah regulasi yang sudah di atur oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Namun seiring berjalannya waktu dalam menjalankan program stunting, masih belum optimalnya dalam mengimplementasikan suatu program yaitu anggaran, kapasitas masyarakat yang belum memahami penyuluhan seperti program hamil dan melakukan gerakan makanan yang bergizi untuk ibu hamil, kurangnya kesadaran orang tua dalam memberikan pola asuh. Namun Dinas Kesehatan tetap menjalankan dengan baik terkait dengan program stunting, dalam kasus stunting di Kecamatan Cisarua ini menurun walaupun tidak signifikan. Hal tersebut dilakukan oleh nakes dan kepala desa setempat dalam menjalankan program stunting seperti USG Gratis, memberikan makanan sehat, program diare, serta memberikan obat-obatan kepada masyarakat Kecamatan Cisarua agar kasus stunting tidak meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Djaenuri, A. (2015). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah. Tangerang Selatan: Universitas terbuka
- Gunawan, W. (2020). Kamus Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bee Media
- Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Public. BPFE-YOGYAKARTA.
- Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A. O., & Anggraini, L. (2018). Stunting dan Upaya Pencegahannya. In Buku stunting dan upaya pencegahannya (Cetakan Pe). CV Mine.
- Rohayatin, T. (2021). Birokrasi Pemerintahan (Cetakan Pe). CV BUDI UTAMA.
- Siagian, S. P. (2016). Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aan Hikmah, S., Ihsan, M., & Hadi, P. (2022). Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Perkembangan Sosial Siswa Kelas IX A SMPN 6 Pujut. *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 7(2), 42–52. <https://doi.org/10.37216/tarbawi.v7i2.646>
- Aryati, D., Irianto, S. E., & Karyus, A. (2023). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Balita Di Kabupaten Lampung

Budijaya, I. (2022). Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2(2), 96–101

Hamrin, & Tanjung, A. (2022). Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *National Jurnal Of Law*, 7(9), 885–896

Normaisa, Mahsyar, & Sudarmi. (2021). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*, 4(1), 1–2. http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/10544%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=tawuran+antar+pelajar&btnG=%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.10323

Prayudi, M. A., Sari Dewi, G. A. K. R., Vijaya, D. P., & Ekawati, L. P. (2019). Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(4), 449–467. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi.

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.

Badan Pusat Statistik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Barat

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Visi, Misi Tugas dan Fungsi nya

Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

